

FUNGSI JURNALISME MEDIA ALTERNATIF DAN MEDIA ARUS UTAMA DALAM LIPUTAN GERAKAN SOSIAL DI RANAH DIGITAL

Trisusilo Raharjo ^{1,*}; Ainun Jariah Yusuf ²; I Putu Juni Antara ³

¹ Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; ts.raharjo@uho.ac.id¹

² Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; ainunjariah Yusuf@unhas.ac.id²

³ Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia; juni.antara@unud.ac.id³

*Correspondence : ts.raharjo@uho.ac.id

ABSTRAK

Pemberitaan media tidak selalu berjalan selaras dengan tujuan suatu gerakan sosial. Literatur terdahulu menekankan adanya dikotomi antara media alternatif dan media arus utama. Paradigma protes menjelaskan bahwa media arus utama cenderung membingkai gerakan sosial secara negatif, sementara media alternatif lebih berpihak pada gerakan. Namun, perkembangan gerakan sosial di ranah digital menunjukkan relasi yang kompleks antara media dan gerakan sosial. Kecenderungan peliputan gerakan tidak lagi dapat dipahami dalam kerangka yang dikotomis. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri fungsi jurnalisme yang dijalankan media dalam peliputan gerakan sosial yang bergerak di ranah digital melalui studi kasus gerakan #Percumalaporpolisi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode framing model Pan dan Kosicki terhadap tiga berita dari Project Multatuli sebagai media alternatif, serta lima berita dari Tirto.id dan delapan berita Kompas.com sebagai representasi media arus utama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Project Multatuli menjalankan fungsi *advocative-radical* dan *analytical-deliberative*, Tirto.id menampilkan fungsi *analytical-deliberative* dan *critical-monitorial*, sementara Kompas.com cenderung pada fungsi *collaborative-facilitative* dan *informational-instructive*. Keberagaman fungsi ini menegaskan bahwa relasi media dan gerakan sosial pada ranah digital tidak dapat lagi direduksi pada posisi bertentangan antara positif dan negatif, melainkan harus dipahami melalui keragaman fungsi jurnalisme yang dijalankan dalam konteks ekosistem gerakan sosial di ranah digital.

Kata kunci

#percumalaporpolisi, Analisis Framing, Fungsi Jurnalisme, Gerakan Sosial

ABSTRACT

Media coverage is not always aligned with the goals of a social movement. Existing literature shows a dichotomy between the roles of alternative media and mainstream media in reporting on social movements. In the protest paradigm, mainstream media often portrays social movements in a negative light. On the other hand, alternative media tends to be more supportive of social movements. As digital-based social movements evolve, media coverage trends also change. Media coverage can no longer be framed in a binary opposition. Therefore, this study aims to further explore the functions of media in covering digital-based social movements. Using the #Percumalaporpolisi movement as a case study, this research conducts a framing analysis of the coverage by Project Multatuli as an alternative media outlet, as well as Tirto.id and Kompas.com as mainstream media outlets, and relates it to the functions of journalism as outlined by Hanitzsch and Vos (2018). The analysis results show that Project Multatuli and Tirto.id exhibit similar tendencies, albeit with different functions. Project Multatuli performs the functions of advocacy-radical and analytical-deliberative. Meanwhile, Tirto.id has the functions of analytical-deliberative and critical-monitorial. Kompas.com, on the other hand,

exhibits collaborative-facilitative and informational-instructive functions. These findings highlight the need for a new perspective in interpreting media trends toward social movements, particularly those that emerge and develop in the digital realm.

Keywords

#percumalaporpolisi, Framing Analysis, Journalism Function, Social Movement

Pendahuluan

Pemberitaan media memainkan peranan yang signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan suatu gerakan sosial. Gamson dan Wolfsfeld (1993) mencatat bahwa setidaknya terdapat tiga peran utama liputan media dalam gerakan sosial, yakni; membantu memobilisasi massa, memberi validasi terhadap eksistensi gerakan, dan membantu memperluas isu. Namun demikian, liputan media tidak selalu berjalan searah dengan tujuan suatu gerakan. Dalam berbagai kasus, pola pemberitaan media justru berpotensi menimbulkan bias yang cenderung melemahkan tujuan awal gerakan.

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa terdapat posisi dikotomis antara media arus utama dan media alternatif dalam memberitakan gerakan sosial. Perbedaan ini didorong oleh karakteristik dari masing-masing media. Herman & Chomsky (2008) memahami bahwa secara karakteristik, media arus utama memiliki atribut yang begitu dekat dengan kekuasaan, hal yang kemudian membuat mereka berpotensi menjadi oposisi gerakan. Atribut-atribut tersebut antara lain; kepemilikan oleh perusahaan besar yang secara tujuan serupa dengan elit kekuasaan, pandangan yang berbeda tidak banyak disuarakan, spektrum perdebatan yang terbatas, penekanan sumber resmi dari institusi, isu yang mudah dialihkan dari perhatian masyarakat. Lebih lanjut, McCurdy (2012) menekankan bahwa media arus utama hanyalah salah satu bagian dari sistem kekuasaan, yang mencakup media milik pemerintah dan/atau media komersial yang tersedia untuk masyarakat umum di radio, media cetak, televisi, dan internet.

Berbeda dengan media arus utama, media alternatif bergerak di luar kekuasaan. Mengacu pada karya-karya Armstrong (1981), Downing (1984), McLeod dan Hertog (1992), dan lainnya, Atkinson (2017) mendefinisikan media alternatif sebagai media yang menantang struktur kekuasaan melalui penggunaan bahasa, menyerukan perubahan sosial yang luas, atau mempertanyakan peran sosial tertentu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan media alternatif sangat erat kaitannya dengan gerakan sosial-politik, kritik, dan perlawanan terhadap dominasi. Bahkan, liputan yang dilakukan media alternatif sering kali menjadi wadah bagi suara-suara dan perspektif kelompok marginal yang keberadaannya tidak diakomodir oleh media arus utama maupun dalam wacana dominan.

Perbedaan karakter dari masing-masing media ini turut memengaruhi cara mereka membingkai pemberitaan gerakan sosial. Media arus utama cenderung membingkai dengan sudut pandang paradigma protes yang menggambarkan gerakan sosial secara negatif (Brown & Harlow, 2019; Howe et al., 2020). Analisis isi dari liputan protes yang dilakukan McLeod dan Hertog (1992) menunjukkan bahwa media arus utama secara konsisten melakukan peliputan yang bias terhadap pengunjuk rasa, terutama ketika kelompok-kelompok protes menentang sistem. Tidak hanya bias, liputan media arus utama juga cenderung memusuhi gerakan sosial-politik (McCurdy, 2012). Sebaliknya, media alternatif memainkan peran yang berbeda. Mereka dapat berfungsi dalam melegitimasi tuntutan protes karena liputannya menyematkan identitas dan keluhan

terhadap ketidaksetaraan (Chan, 2017) serta, dalam tataran tertentu, memberi wacana tandingan bagi media arus utama (Atton, 2002).

Karakteristik yang berbeda antara media arus utama dan media alternatif pada akhirnya menegaskan posisi dikotomis di antara keduanya dalam meliput gerakan sosial. Lebih lanjut, selain karakteristik media, tipologi gerakan juga memengaruhi cara media memberitakan gerakan sosial. Gerakan yang dilakukan secara langsung dan besarnya ancaman terhadap status quo berpotensi lebih besar dibingkai menggunakan paradigma protes. Hal ini dapat dilihat dari temuan McLeod & Hertog (1992) yang mencatat bahwa media sering menggunakan bingkai kerusuhan, konfrontasi, dan spectacle untuk mendelegitimasi protes dan pengunjuk rasa.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta diadopsinya platform-platform digital sebagai arena baru gerakan sosial, cara media melaporkan peristiwa gerakan sosial juga turut berubah. Hasil studi terbaru menunjukkan batasan antara media alternatif dan media arus utama dalam meliput isu-isu gerakan sosial menjadi semakin kabur seiring dengan semakin beragamnya gerakan dan perkembangan media (Harlow et al., 2020; Harlow & Johnson, 2011a, 2011b). Seperti yang terjadi selama gerakan Musim Semi Arab, media arus utama secara lebih aktif memasukkan konten yang dibuat oleh pengguna (user-generated content/UGC) sebagai bahan berita, seperti yang dibuktikan dengan penggunaan jurnalisme warga selama berbagai protes (Hänska-Ahy & Shapour, 2013). Selain itu, artikel-artikel tentang protes yang diposting di media sosial tidak selalu sesuai dengan paradigma protes yang selama ini diasosiasikan dengan pemberitaan media arus utama tentang gerakan sosial (Harlow et al., 2020).

Keberagaman pemberitaan media yang dipengaruhi oleh aktivitas gerakan di media sosial mengindikasikan adanya pergeseran dalam cara-cara peliputan isu-isu gerakan sosial. Penelitian Moscato (2016) tentang aktivisme tagar menunjukkan bahwa liputan yang dilakukan media arus utama dan media alternatif terhadap gerakan sosial di media sosial begitu beragam. Sebagai contoh, dua media nasional Kanada meliput gerakan #idlenomore secara berbeda, satu media memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kekuatan sosial dan teknologi yang mendorong gerakan tersebut, sementara media yang lain berfokus pada tindakan yang lebih provokatif dan menunjukkan polaritas yang lebih besar.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk memahami lebih lanjut pemberitaan yang dilakukan, baik oleh media arus utama maupun media alternatif, terhadap gerakan sosial. Karena bagaimanapun, pendekatan paradigma protes yang selama ini membagi posisi dikotomis antara media arus utama dan media alternatif dalam memberitakan gerakan sosial perlu ditinjau ulang mengingat semakin kompleksnya tipologi gerakan yang dipengaruhi oleh kehadiran teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi jurnalistik yang digagas oleh Hanitzsch & Vos (2018) untuk memahami hubungan antara liputan media dan gerakan sosial, terutama dalam gerakan berbasis digital seperti aktivisme tagar.

Pendekatan fungsi jurnalistik Hanitzsch & Vos (2018) menekankan kehadiran media dalam kehidupan politik dan kehidupan sehari-hari dengan memperluas area studi pada kehidupan demokrasi masyarakat non-barat. Dalam ranah politik, jurnalisme memiliki tujuan utama untuk menghadirkan informasi yang diperlukan warga negara agar mereka bisa mengambil keputusan, berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta, mampu mengatur diri mereka sendiri ketika ruang kebebasan tersedia. Pendekatan ini

menjadi penting mengingat gerakan sosial yang berkembang melalui media digital lebih inklusif karena memungkinkan setiap orang menyampaikan keluhan dan terlibat dalam percakapan politik (Olagunju et al., 2022). Lebih lanjut, pendekatan ini penting untuk digunakan dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia yang memiliki dinamika demokrasi yang berbeda dengan konteks barat.

Dengan konteks tersebut, penelitian ini menganalisis kasus gerakan sosial #Percumalaporpolisi sebagai representasi bagaimana praktik jurnalisme berkelindan dengan gerakan sosial yang berlangsung melalui media sosial. #Percumalaporpolisi merupakan tagar yang digunakan masyarakat sebagai simbol kritik terhadap kinerja kepolisian. Tagar ini berkembang di media sosial setelah laporan investigatif yang dilakukan Project Multatuli ketika menyoroti kegagalan polisi mengambil tindakan yang tepat terhadap kasus pelecehan anak yang dilaporkan oleh seorang ibu. Tagar ini kemudian diadopsi oleh publik secara meluas untuk menceritakan pengalaman individu masyarakat yang menghadapi inkompetensi kinerja kepolisian. Protes yang terus meluas mendorong media-media arus utama untuk turut mengamplifikasi pemberitaan hingga mendapat perhatian pemerintah dan institusi kepolisian untuk berbenah.

Dengan mengkaji pemberitaan media alternatif dan media arus utama dalam gerakan sosial #Percumalaporpolisi yang berkembang di media sosial, penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi yang dijalankan media alternatif dan media arus utama dalam memberitakan gerakan sosial khususnya gerakan yang berkembang di ranah digital. Tujuan ini diharapkan dapat mengisi celah riset-riset terdahulu yang menekankan posisi dikotomis antara media arus utama dan media alternatif dalam memberitakan gerakan sosial. Lebih lanjut, dalam aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi praktik jurnalisme yang lebih demokratis bagi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menelaah pemberitaan gerakan #Percumalaporpolisi yang dilakukan oleh Project Multatuli, Kompas.com, dan Tirto.id. Pemilihan ketiga media tersebut didasarkan pada pertimbangan posisi, peran, dan pengaruhnya dalam wacana publik. Project Multatuli dipilih karena merupakan media alternatif yang mempopulerkan tagar #Percumalaporpolisi, sekaligus memiliki karakteristik sebagai media yang berpihak pada isu-isu marjinal dengan pendekatan partisipatif melalui media sosial. Dengan demikian, Project Multatuli penting untuk dilihat bagaimana framing yang dibangun dari perspektif media alternatif.

Sementara itu, Kompas.com dipilih sebagai representasi media arus utama karena merupakan salah satu portal berita terbesar dengan kredibilitas dan sejarah panjang di Indonesia. Menurut data (Similarweb, 2021), hingga saat ini Kompas.com secara konsisten masuk dalam tiga besar situs berita daring dengan jumlah pengunjung bulanan terbanyak, menjangkau lebih dari 100 juta kunjungan per bulan. Selain itu, Kompas.com dikenal sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group, salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini publik nasional.

Adapun Tirto.id sebagai media *digital native* yang mencapai status arus utama melalui pendekatan jurnalisme data yang relatif lebih muda dibanding Kompas.com yang merupakan raksasa media konvensional yang bertransformasi ke daring, namun tetap menempati posisi penting dalam lanskap media daring Indonesia. Tirto.id dikenal dengan reputasinya dalam jurnalisme data, liputan investigatif, dan analisis mendalam.

Menurut laporan Similarweb (2021), Tirto.id berada dalam 50 besar situs berita daring terpopuler di Indonesia, dengan basis pembaca urban, terdidik, dan aktif di media sosial. Hal ini membuat Tirto.id menjadi representasi media arus utama dengan gaya penyajian berita yang lebih progresif dan analitis dibanding Kompas.com.

Sumber berita diperoleh melalui penelusuran tagar #Percumalaporpolisi pada platform media sosial X yang merupakan arena dimana percakapan #Percumalaporpolisi berkembang. Periode waktu yang ditetapkan adalah berita yang diunggah bulan Oktober hingga Desember 2021 yang merupakan periode berkembangnya isu dan cuitan #Percumalaporpolisi. Pemilihan berita disesuaikan dengan beberapa kriteria yang ditetapkan, yakni: (1) berita harus berasal dari tautan resmi tiga media yang diteliti, (2) artikel tersedia dalam versi lengkap di laman resmi media, dan (3) jumlah kata minimal 300. Melalui kriteria ini terkumpul 16 artikel berita, terdiri dari tiga artikel Project Multatuli, delapan artikel Kompas.com, dan lima artikel Tirto.id. Proses verifikasi dilakukan dengan membuka langsung tautan ke situs resmi masing-masing media untuk memastikan keaslian dan kelengkapan teks berita.

Selanjutnya seluruh artikel dianalisis menggunakan analisis framing dengan model Pan & Kosicki (1993). Model ini dipilih karena menawarkan perangkat analisis yang lebih rinci pada level struktur teks melalui empat dimensi: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana konstruksi berita dibangun, tidak hanya melalui isi tetapi juga melalui cara penyusunan narasi dan pemilihan bahasa. Hasil dari analisis ini kemudian dapat langsung dipadukan dengan enam fungsi jurnalisme Hanitzsch & Vos (2018), sehingga tidak hanya terlihat bagaimana media membingkai gerakan #Percumalaporpolisi, tetapi juga bagaimana posisi dan peran institusional media tersebut dipraktikkan dalam hubungannya dengan masyarakat dan gerakan sosial.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, seluruh berita yang terkumpul dari tiga media dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman awal. Kedua, peneliti menyusun lembar kode (*coding sheet*) berdasarkan indikator Pan & Kosicki, (1993), mencakup kategori seperti: struktur sintaksis (judul, lead, sumber), struktur skrip (alur cerita dan strategi bertutur), struktur tematik (argumen dan proposisi), serta struktur retorik (pilihan kata, idiom, atau ilustrasi visual). Ketiga, setiap berita *dicoding* sesuai dengan kategori tersebut. *Coding* dilakukan oleh peneliti utama dan diverifikasi oleh *coder* tambahan (penulis kedua dan ketiga) untuk mengurangi bias subjektif. Perbedaan hasil *coding* kemudian dibahas hingga tercapai kesepakatan. Untuk menjaga reliabilitas dan kredibilitas, penelitian ini juga melibatkan *peer debriefing* dengan rekan sejawat di bidang komunikasi.

Hasil analisis framing kemudian disesuaikan dengan enam fungsi jurnalisme dari Hanitzsch & Vos (2018), yakni: (1) *informational-instructive* yang merupakan gagasan bahwa media harus menyediakan informasi yang relevan bagi publik untuk dapat bertindak dan berpartisipasi dalam kehidupan politik; (2) *analytical-deliberative* yang berkaitan erat dengan peran jurnalisme yang lebih aktif dan tegas dengan mengintervensi secara langsung wacana yang berkembang; (3) *critical-monitorial* berkaitan dengan peran jurnalisme sebagai "pilar keempat negara"; (4) *advocative-radical* yang berkaitan dengan jurnalis yang melibatkan diri dalam kehidupan politik, berbicara atas nama kelompok tertentu, menjadi pendukung nilai atau ideologi tertentu dan menjadi pihak yang berseberangan dengan penguasa; (5) *Developmental-educative* berkaitan dengan keterlibatan jurnalis dalam mendorong perubahan sosial; (6)

collaborative-facilitative yang berkaitan dengan peran jurnalis sebagai mitra konstruktif pemerintah.

Penggunaan perangkat analisis framing model Pan & Kosicki (1993) serta kerangka konsep fungsi jurnalisisme Hanitzsch & Vos (2018) menjadi penting untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana media alternatif dan media arus utama membingkai gerakan #Percumalaporpolisi serta bagaimana mereka memposisikan diri dalam konteks peran jurnalisisme terhadap gerakan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Tabel-tabel berikut merangkum ringkasan isi faktual setiap artikel sekaligus justifikasi pengodean fungsinya; narasi setelah tabel mengelaborasi pola lintas-artikel, negative/deviant cases, dan implikasi konseptualnya bagi relasi antara media dan gerakan sosial di ekologi platform digital. Tabel yang menyertai bagian ini berfungsi sebagai peta temuan. Sementara uraian sesudahnya mengikat temuan ke perdebatan teoretik mengenai dikotomi arus utama–alternatif yang kian berpori dalam konteks aktivisme berbasis tagar.

Project Multatuli: *Advocate-Radical* dan *Analytical-Deliberative*

Tabel 1. Hasil analisis berita Project Multatuli

No.	Judul Berita	Penulis	Terbit	Analisis
1	Setelah Viral, Polisi Menyelidiki lagi kasus dugaan kepolisian Pencabulan tiga anak. Tapi jalan keadilan masih terjal	Eko Rusdianto	12/11/2021	Berita ini menegaskan upaya pihak kepolisian untuk membuka ulang kasus dugaan pencabulan. Namun upaya yang digunakan masih tidak berpihak kepada korban dan belum menemui hasil yang maksimal. Upaya untuk membuka kasus ini juga mengakibatkan kembalinya trauma pihak korban yang berharap agar kepolisian bertindak humanis. Hal ini mengindikasikan keberpihakan berita kepada Korban sekaligus mengkritisi proses kerja kepolisian.
2	Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.	Eko Rusdianto	06/10/2021	Ide utama dari berita menceritakan kekecewaan pelapor atas kasus pemerkosaan yang mendapat tanggapan negatif dari pihak kepolisian. Ide

				utama juga didukung dengan subtema yang muncul dan penggunaan foto grafis dalam berita.
3	Pencurian Data dan KBGO: Suara Korban yang Dianggap Remeh Polisi - Project Multatuli	Charlenne Kayla Roeslie	05/11/2021	Penulis melihat kinerja kepolisian buruk dalam penanganan kasus KBGO. Polisi dianggap tidak serius menangani kasus yang ada. Tulisan ini bisa dianggap mendukung ide #Percumalaporpolisi

Sumber: projectmultatuli.org

Project Multatuli menerbitkan berita yang mengungkapkan upaya tak kenal lelah dari para penyintas kekerasan seksual dalam mencari keadilan. Media yang dikenal dengan dukungannya terhadap para penyintas ini menggunakan sudut pandang penyintas untuk menyoroti kinerja polisi yang tidak efisien dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Penggunaan perspektif penyintas sekaligus menggaungkan dan menarik orang-orang lain untuk terlibat dalam percakapan di media sosial mengenai buruknya kinerja kepolisian dengan konsisten menggunakan tagar yang sama, yakni #Percumalaporpolisi.

Secara umum, berita-berita yang dipublikasikan oleh Project Multatuli memiliki karakteristik yang menunjukkan kecenderungan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai *advocate-radical* dan *analytical-deliberative*. Melalui pemberitaan yang ada, media ini memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam wacana-politik dan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengkritisi otoritas institusi kepolisian. Sebagai *advocate-radical*, Project Multatuli memposisikan diri sebagai pihak antagonis yang cenderung skeptis dan kirtis terhadap kebijakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam konteks “jarak kekuasaan” yang disebutkan oleh Hanitzsch (2011) posisi Project Multatuli ini merepresentasikan kutub lawan dengan jarak kekuasaan yang tinggi.

Dalam fungsinya sebagai *Advocate-Radical*, pemberitaan Project Multatuli menjadi platform bagi para penyintas kekerasan seksual untuk bersuara. Penggunaan perspektif penyintas ini sejalan dengan bentuk agenda media yang oleh Pintak & Nazir (2013) disebut sebagai “suara kaum miskin” yang mana pengalaman dan kesaksian mereka begitu berharga untuk mendorong pengaruh yang besar bagi perubahan sosial. Selain itu, dalam menjalankan fungsi advokasinya, project multatuli selalu menggunakan nama samaran bagi setiap penyintas untuk memastikan kerahasiaan narasumber, hal yang begitu sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme advokasi (Janowitz, 1975).

Selain *advocate-radical*, Project Multatuli juga menjalankan fungsi *analytical-deliberative* yang dapat dilihat dari cara mereka menekankan pemberitaan pada subjektivitas dan opini. Project Multatuli menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang dihadapi dengan menelusuri penyebab dan memprediksi konsekuensi dari peristiwa yang dialami oleh para penyintas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hornmoen & Steensen (2014) yang mengakui pentingnya organisasi

media melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat dan memahami pengalaman mereka untuk menyampaikan informasi yang paling penting kepada masyarakat.

Dalam menelusuri penyebab kasus pemerkosaan di Luwu Timur, Project Multatuli melanjutkan pelaporan #Percumalaporpolisi dengan secara eksplisit menyampaikan konsekuensi yang mungkin timbul dari pengabaian kasus yang dilaporkan. Subjektivitas pelaporan Project Multatuli telah menghasilkan dukungan solidaritas masyarakat terhadap para penyintas, yang dibuktikan dengan viralnya tagar #Percumalaporpolisi dan solidaritas media. Banyaknya tagar tersebut merupakan bukti partisipasi masyarakat dalam ranah politik (Rosen, 2000; Weaver et al., 2007) memperkuat gerakan yang memposisikan media sebagai kekuatan penyeimbang terhadap otoritas pemerintah, khususnya institusi kepolisian, dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik.

Secara keseluruhan, gaya pelaporan Project Multatuli memungkinkan mereka menjadi suara yang kuat bagi para penyintas kekerasan seksual, mengekspos kekurangan polisi dalam menangani kasus-kasus semacam itu dan mendorong solidaritas masyarakat untuk mendukung para penyintas.

Tirto.id: Analytical-Deliberative dan Critical-Monitorial

Tabel 2. Hasil analisis berita Tirto.id

No.	Judul Berita	Penulis	Terbit	Analisis
1	Babak Baru Kasus Pemerkosaan di Luwu Timur Usai Terduga Lapor Balik	Adi Briantika	19/10/2021	Penulis berita mengarahkan berita pada hipotesis bahwa polisi harus profesional dan serius menangani kasus kekerasan seksual yang menjadi bagian dari laporan #Percumalaporpolisi.
2	Cara Menjinakkan Polisi di Berbagai Negara	Mochamad Naufal	27/10/2021	Penulis ingin menyampaikan opininya bahwa perlu adanya perubahan dalam kepolisian di Indonesia yang saat ini tingkat ketidakpercayaan oleh masyarakat terus meningkat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang telah dilakukan oleh negara-negara lain yang telah disebutkan dalam isi tulisan.
3	Kontras Desak Polri Perbaiki Kinerja usai Ramai #Percumalaporpolisi	Adi Briantika	11/10/2021	Berita ini mengindikasikan keberpihakannya kepada gerakan #Percumalaporpolisi dengan cara menekankan komentar KONTRAS yang menganggap gerakan #Percumalaporpolisi sebagai kritik atas kinerja kepolisian. Sementara tanggapan kepolisian

				hanya diberikan ruang untuk mengamini kritik masyarakat.
4	Membedah Citra Polri Lewat Tagar #Percumalaporpolisi	Irma Garnesi	8/1/2022	Dalam berita tersebut, Tirto mendukung hipotesis bahwa perlu adanya perbaikan kinerja Polri. Tirto melihat #Percumalaporpolisi sebagai hal yang signifikan yang menunjukkan kritik masyarakat terhadap polri.
5	Mabes Polri Bantah Ladeni #Percumalaporpolisi di Medsos	Adi Briantika	13/10/2021	Terdapat kecurigaan atas munculnya tagar #polisisesuai prosedur yang didukung oleh latar cerita sebagai lead berita. Ditambah dengan balasan atas pernyataan kepolisian dan disebutkan bahwa tagar #polisisesuai prosedur merupakan bentuk defensif kepolisian yang didukung dengan pemilihan foto dan caption yang digunakan.

Sumber: tirto.id

Artikel berita yang dipublikasikan oleh Tirto.id merupakan tindak lanjut dari tagar #Percumalaporpolisi yang sedang ramai di media sosial. Dalam pemberitaannya, Tirto.id secara efektif memberi legitimasi kritik publik terhadap kinerja polisi yang diwakili oleh tagar tersebut, sekaligus mendorong penggunaannya sebagai alat untuk reformasi kelembagaan kepolisian.

Pemberitaan Tirto.id tentang #Percumalaporpolisi memiliki berbagai fungsi, dengan fungsi yang paling dominan adalah *analytical-deliberative*. Hal ini terlihat dari bagaimana Tirto.id mengintervensi kasus ini dengan memberikan ruang bagi organisasi masyarakat untuk mengomentari wacana politik yang melingkupinya. Dengan memberikan ruang kepada publik, Tirto.id telah memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang isu dan masalah yang ada, sehingga menghasilkan liputan berita yang lebih terfokus dan mendalam - sebuah tujuan yang serupa dengan jurnalisme publik (Nip, 2006).

Berita-berita Tirto.id menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap tagar #Percumalaporpolisi, yang dipandang sebagai representasi kritik publik terhadap institusi kepolisian. Model pemberitaan yang digunakan Tirto.id adalah dengan menganalisis keluhan masyarakat yang sedang berlangsung terkait tagar tersebut, menyediakan platform bagi organisasi masyarakat untuk mengekspresikan keprihatinan dan kritik mereka.

Selain itu, Tirto.id secara aktif menginvestigasi respon pemerintah terhadap viralnya tagar #Percumalaporpolisi, termasuk kemunculan tagar #PolisiSesuaiProsedur, yang dilihat sebagai respon defensif dari pihak kepolisian. Fungsi pengawasan yang

kritis (*critical-monitorial function*) ini menunjukkan peran Tirto.id dalam mengartikulasikan skeptisisme dan kritik terhadap pemerintah dan elite lainnya.

Untuk mendorong reformasi di institusi kepolisian, pemberitaan Tirto.id tidak sekadar melaporkan fakta berdasarkan wawancara dengan narasumber. Sebaliknya, Tirto.id secara aktif mencari tagar-tagar trending yang muncul dan menyelidiki asal-usul dan implikasinya. Peliputan investigasi ini melibatkan pengungkapan fakta dan konflik melawan kekuasaan yang sudah mapan, sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme kritis.

Secara keseluruhan, laporan Tirto.id tentang #Percumalaporpolisi menunjukkan komitmennya pada jurnalisme publik dan fungsi pengawasan kritis, menyediakan platform untuk wacana publik dan secara aktif meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkuasa.

Kompas.com: Informational-instructive dan Collaborative-facilitative

Tabel 3. Hasil analisis berita Kompas.com

No.	Judul Berita	Penulis	Terbit	Analisis
1	Ramai Tagar #Percumalaporpolisi dinilai harus jadi momentum reformasi Polri	Tsarina Maharani	11/10/2021	Berita ini menggunakan dua perspektif yang berbeda terkait dengan viralnya tagar #Percumalaporpolisi. Berita ini menjelaskan bagaimana respon terhadap gerakan #Percumalaporpolisi dari sisi KONTRAS dan KEPOLISIAN. Namun keberpihakkan sedikit diarahkan kepada pihak yang pro gerakan (KONTRAS) ditinjau dari banyaknya kutipan yang diambil dari pernyataan KONTRAS berbanding dengan sumber KEPOLISIAN.
2	Soal #Percumalaporpolisi hingga #SatuHariSatuOknum, Kapolri Minta Jajarannya Evaluasi	Rahel Narda	17/12/2021	Penulis sangat menekankan berita pada ketokohan Kapolri. Dalam hal ini penulis berita melihat bahwa tanggapan Kapolri sebagai pimpinan dari lembaga yang sedang disoroti adalah hal yang signifikan untuk disampaikan ke publik. Gaya bahasa yang digunakan terkesan menyederhanakan isu dan tidak berusaha mendalami lebih jauh konteksnya.

3	Tagar #Percumalaporpolisi, Bentuk Kekecewaan Kolektif Masyarakat	Rahel Narda Chaterine	15/10/2021	Berita fokus pada pendapat pakar terkait ramainya tagar #Percumalaporpolisi. Berdasarkan pendapat pakar tersebut ramainya tagar #Percumalaporpolisi merupakan bentuk kekecewaan masyarakat.
4	Pakar Unair: Tagar Percuma Lapor Polisi Bisa Picu Main Hakim Sendiri	Sandra Desi Caesaria	25/01/2022	Berita ini mengambil sumber akademisi sebagai sumber utama dalam pemberitaan. Kutipan yang digunakan lebih menjelaskan bagaimana gerakan #Percumalaporpolisi di media sosial bisa menjadi viral dan bagaimana kepolisian harus bersikap atas tuntutan tersebut.
5	Kasus Dugaan Pemeriksaan 3 Anak di Luwu Timur, Ini Kata Komnas Perempuan	Jawahir Gustav Rizal	10/10/2021	Berita ini fokus pada tanggapan dan upaya Komnas Perempuan dalam kasus kekerasan seksual di Lutim. Tidak adanya narasumber lain dalam berita ini, memberikan kesan berita menyederhanakan kondisi yang terjadi.
6	Ramai Tagar #Percumalaporpolisi, Kemana Sebaiknya Korban Pemeriksaan Mengadu?	Artika Rachmi Farmita	9/10/2021	Adanya dukungan terhadap berita yang mencetuskan tagar #Percumalaporpolisi yakni Project Multatuli melalui ilustrasi yang digunakan dan publikasi ulang. Saran yang diberikan sebagai isi berita juga merupakan bentuk dukungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
7	Tagar #Percumalaporpolisi dan Kasus-kasus ketidakadilan yang jadi sorotan	Rakhmat Nur Hakim	15/10/2021	Berita ini menjelaskan kasus-kasus yang menjadi polemik di masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian sembari memberi ruang jawab bagi kepolisian terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

8	Tagar #Percumalaporpolisi dan Pesan Jokowi agar Polisi Lindungi Warga	Ahmad Naufal Dzulfaroh	05/12/2021	Berita fokus pada tanggapan narasumber terhadap viralnya tagar dan kinerja polisi dalam penanganan kasus. Penulis melihat #Percumalaporpolisi sebagai tren namun tidak menelisik lebih jauh mengenai tagar tersebut dan juga kinerja polisi dengan fakta yang lebih dalam. Terfokusnya pada dua narasumber dan pemilihan kata memberikan kesan penulis menyederhanakan kasus yang sedang berlangsung.
---	--	------------------------------	------------	---

Sumber: kompas.com

Kuantitas berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com terkait tagar #Percumalaporpolisi menunjukkan adanya perhatian yang konsisten terhadap perkembangan isu tersebut. Frekuensi pemberitaan yang relative tinggi ini tercermin dari publikasi yang dilakukan secara rutin sepanjang periode yang diamati. Dalam liputannya, Kompas.com banyak menampilkan pernyataan dan informasi dari sumber-sumber resmi, seperti pihak pemerintah dan institusi terkait, yang memiliki keterlibatan langsung dengan gerakan ini. Narasumber dari kalangan otoritas muncul dalam porsi yang dominan, sementara suara korban atau kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari gerakan ini relatif lebih sedikit diangkat. Struktur pemberitaan seperti ini memperlihatkan pola penekanan pada informasi yang bersumber dari institusi formal.

Pola pemberitaan yang dilakukan Kompas.com menunjukkan mereka menjalankan fungsi *Informational-instructive* dan juga *collaborative-facillitative*. Sebagai *informational-instructive*, Kompas.com menyajikan kasus #Percumalaporpolisi dengan bahasa yang netral. Media ini tidak mengeksplorasi isu tersebut lebih jauh, melainkan memberikan pernyataan dari berbagai otoritas resmi seperti polisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk menjelaskan kasus tersebut. Upaya media tersebut terutama untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kemunculan gerakan #Percumalaporpolisi adalah dengan menempatkan peristiwa dalam konteks umum, hal ini sejalan dengan salah satu peran penting jurnalis dalam memberikan informasi kepada masyarakat (Standaert et al., 2019).

Willnat et al. (2019) menyatakan bahwa fungsi informatif dan instruktif didorong oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan menghindari informasi dari sumber yang belum terverifikasi. Jurnalis menganggap berita sebagai cerminan dari apa yang terjadi di lapangan dan cenderung menempatkan isu atau peristiwa sebagai hal yang harus dilaporkan. Pandangan ini, yang telah dikritik secara luas sebagai contoh realisme naif, menonjol di kalangan jurnalis di seluruh dunia (Standaert et al., 2019)

Selain fungsi *informational-instructive*, pemberitaan Kompas.com juga menunjukkan posisi mereka sebagai *collaborative-facillitative* dengan menjadi platform

bagi otoritas pemerintah untuk memberikan klarifikasi. Peran yang dijalankan oleh Kompas.com merupakan hal yang umum dilakukan oleh media. Menurut Willnat et al. (2019) jurnalis menganggap bahwa menyelidiki klaim pemerintah merupakan peran penting bagi media. Meskipun media tersebut mungkin tidak secara eksplisit mendukung pemerintah, mereka memiliki tujuan yang sama untuk menekankan kemajuan pembangunan dan menjaga persatuan nasional (Standaert et al., 2019). Selain itu, Kompas.com memberikan ruang bagi LSM dan akademisi dalam beberapa pemberitaannya, yang dapat menarik perhatian simpatisan dan aktivis gerakan (Wettstein et al., 2018)

Melampaui Dikotomi: Fungsi Jurnalisme dalam konteks Berita Gerakan Sosial

Secara komparatif, ketiga media memperlihatkan konstelasi fungsi jurnalisme yang tidak sepenuhnya biner (arus utama vs alternatif), melainkan hibrida dan berjenjang sesuai konfigurasi sumber, rutinitas redaksional, dan fase isu. Project Multatuli paling menonjol pada *advocate-radical* (keberpihakan pada suara penyintas; seruan perubahan) sekaligus *analytical-deliberative* (pemaknaan kausal, konsekuensi kebijakan). Tirto.id dominan *analytical-Deliberative* dan *critical-monitorial* (investigasi respons institusi, penelusuran tagar tandingan, skeptisisme atas klaim resmi). Kompas.com relatif *informational-instructive* dan *collaborative-facilitative* (dominasi sumber resmi, fasilitasi klarifikasi otoritas, serta saran praktis kepada publik). Pola ini konsisten dengan data dan tabel hasil yang telah disajikan sebelumnya dalam naskah.

Persamaannya, ketiganya sama-sama mengakui signifikansi isu #PercumaLaporPolisi dan menyediakan ruang pemberitaan yang memperluas agenda publik. Perbedaannya, porsi yang dipilih bagi sumber pemberitaan dan nada liputan yang bervariasi: Project Multatuli memusat pada pengalaman penyintas; Tirto.id menggabungkan deliberasi (pakar/LSM) dengan fungsi *watchdog*; Kompas.com mengutamakan sumber resmi dan mediasi institusional. Secara teoretik, keberagaman fungsi ini memperluas pendekatan peran jurnalisme (*journalistic roles*) yang menempatkan jurnalisme bukan semata perangkat demokrasi elektoral, tetapi juga institusi diskursif yang bekerja dalam kehidupan politik dan keseharian warga (Hanitzsch & Vos, 2018).

Temuan lintas-media di atas perlu dibaca dalam lanskap kebebasan pers Indonesia yang beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dalam laporan (*Borders, 2025*), penguatan oligarki media dengan kepentingan politik serta ancaman regulasi (UU ITE, pidana pencemaran nama baik, dan perubahan KUHP yang berpotensi membatasi jurnalisme investigasi) sebagai faktor penghambat ekosistem jurnalisme independen.

Dalam kondisi seperti itu, fungsi *informational-instructive/collaborative-facilitative* pada media arus utama dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketergantungan pada sumber resmi, kalkulasi risiko hukum, dan tuntutan rutinitas straight news—bukan semata preferensi normatif. Sebaliknya, fungsi *advocate-radical/critical-monitorial* yang lebih menonjol di outlet media non-arus utama/berorientasi investigasi mengindikasikan ruang manuver yang lebih besar untuk menantang klaim institusi dan mengangkat pengalaman warga (khususnya penyintas) sebagai modal legitimasi gerakan. Pola ini selaras dengan literatur yang menekankan relasi saling-mempengaruhi antara gerakan sosial dan media (Gamson & Wolfsfeld, 1993) serta pembaruan riset protest paradigm pada era platform, yang menunjukkan bahwa batas delegitimasi/legitimasi di media kian bergeser bergantung pada konfigurasi aktor, platform, dan momen politik (Harlow & Johnson, 2011a)

Sejalan dengan tujuan riset pada yang telah disampaikan di awal, hasil komparatif ini menunjukkan bahwa fungsi jurnalisme bersifat hibrida dan kontekstual, bukan hitam-putih. Temuan memperluas tesis Hanitzsch & Vos (2018) bahwa peran jurnalisme beroperasi melampaui horizon demokrasi elektoral dan meresap ke praktik keseharian. Dalam hal ini, fungsi hibrida muncul sebagai kondisi batas yang dipengaruhi ekologi platform dan struktur kekuasaan lokal.

Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media, baik alternatif maupun arus utama, menjalankan fungsi yang beragam dalam memberitakan gerakan sosial berbasis digital. Hal ini memperluas pemahaman mengenai posisi media dalam peliputan gerakan sosial yang selama ini secara tradisional kerap direduksi ke dalam posisi dikotomis: media alternatif dianggap sebagai pendukung gerakan, sementara media arus utama ditempatkan sebagai oposisi terhadap gerakan.

Berdasarkan analisis framing Pan dan Kosicki terhadap 16 laporan pemberitaan mengenai gerakan #PercumaLaporPolisi, penelitian ini menemukan bahwa Project Multatuli, sebagai representasi media alternatif, cenderung mengadopsi fungsi *advocative-radical* dan *analytical-deliberative*. Project Multatuli menempatkan dirinya sebagai medium bagi penyintas kekerasan seksual untuk bersuara, sekaligus sebagai aktor yang memberikan kritik terhadap otoritas kekuasaan. Fungsi yang dijalankan tersebut sejalan dengan posisi yang selama ini diasosiasikan dengan media alternatif, yakni menjadi bagian dari gerakan yang menentang struktur kekuasaan.

Sebaliknya, media arus utama menunjukkan keragaman fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan posisi yang selama ini dilekatkan melalui pendekatan paradigma protes. Tirto.id secara dominan menampilkan fungsi *analytical-deliberative* dan *critical-monitorial* melalui pemberitaan yang mendalam serta dengan memberikan legitimasi terhadap tuntutan gerakan #PercumaLaporPolisi. Fungsi ini mengindikasikan posisi Tirto.id yang cenderung berpihak pada gerakan dengan menghadirkan informasi yang relevan bagi publik untuk memahami isu tersebut secara lebih komprehensif. Berbeda halnya dengan Kompas.com yang cenderung menjalankan fungsi *informational-instructive* dan *collaborative-facilitative*. Kompas.com lebih menekankan pada penyampaian informasi dasar tanpa eksplorasi mendalam atas isu yang diangkat gerakan, serta memberikan ruang yang lebih besar kepada narasumber dari kalangan institusi. Hal ini mengindikasikan kecenderungan Kompas.com untuk lebih berpihak pada suara otoritas.

Keragaman fungsi media dalam pemberitaan gerakan #PercumaLaporPolisi menegaskan bahwa relasi antara media dan gerakan sosial tidak dapat dipahami secara dikotomis. Kehadiran teknologi digital sebagai arena baru bagi gerakan sosial turut memengaruhi cara media membingkai isu serta memosisikan dirinya dalam konteks gerakan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat dalam memahami relasi antara media dan gerakan sosial, sekaligus mendorong media untuk menghadirkan pemberitaan yang lebih demokratis.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya menganalisis satu gerakan sosial berbasis digital. Temuan yang dihasilkan karenanya berpotensi berbeda jika diterapkan pada model gerakan lain yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya

menelaah peran media dalam berbagai tipe gerakan sosial dengan cakupan yang lebih luas, sehingga memungkinkan diperolehnya temuan yang lebih beragam.

Referensi

- Armstrong, D. (1981). *A Trumpet to Arms: Alternative Media in America*. South End Press.
- Atkinson, J. (2017). *Journey into Social Activism: Qualitative Approaches*. Fordham University Press.
- Atton, C. (2002). News Cultures and New Social Movements: Radical journalism and the mainstream media. *Journalism Studies*, 3(4), 491–505. <https://doi.org/10.1080/1461670022000019209>
- Borders, R. W. (2025). *RSF World Press Freedom Index 2025: economic fragility a leading threat to press freedom*. <https://rsf.org/en/rsf-world-press-freedom-index-2025-economic-fragility-leading-threat-press-freedom>
- Brown, D., & Harlow, S. (2019). Protests, Media Coverage, and a Hierarchy of Social Struggle. *The International Journal of Press/Politics*, 24(4), 508–530. <https://doi.org/10.1177/1940161219853517>
- Chan, M. (2017). Media Use and the Social Identity Model of Collective Action: Examining the Roles of Online Alternative News and Social Media News. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 94(3), 663–681. <https://doi.org/10.1177/1077699016638837>
- Downing, J. (1984). *Radical Media: The Political Experience of Alternative Communication*. South End Press.
- Gamson, W. A., & Wolfsfeld, G. (1993). Movements and Media as Interacting Systems. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 528(1), 114–125. <https://doi.org/10.1177/0002716293528001009>
- Hanitzsch, T. (2011). Populist Disseminators, Detached Watchdogs, Critical Change Agents and Opportunist Facilitators: Professional Milieus, the Journalistic Field and Autonomy in 18 Countries. *International Communication Gazette*, 73(6), 477–494. <https://doi.org/10.1177/1748048511412279>
- Hanitzsch, T., & Vos, T. P. (2018). Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday life. *Journalism*, 19(2), 146–164. <https://doi.org/10.1177/1464884916673386>
- Hänksa-Ahy, M. T., & Shapour, R. (2013). Who's Reporting the Protests: Converging practices of citizen journalists and two BBC World Service newsrooms, from Iran's election protests to the Arab uprisings. *Journalism Studies*, 14(1), 29–45. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2012.657908>
- Harlow, S., & Johnson, T. (2011a). Overthrowing the Protest Paradigm? How The New York Times, Global Voices and Twitter Covered the Egyptian Revolution. *International Journal of Communication*, 5(16), 1359–1374.
- Harlow, S., & Johnson, T. J. (2011b). The Arab Spring| Overthrowing the Protest Paradigm? How The New York Times, Global Voices and Twitter Covered the Egyptian Revolution. *International Journal of Communication*, 5, 16. <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1239>
- Harlow, S., Kilgo, D. K., Salaverría, R., & García-Perdomo, V. (2020). Is the Whole World Watching? Building a Typology of Protest Coverage on Social Media From Around the World. *Journalism Studies*, 21(11), 1590–1608. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1776144>
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2008). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. The Bodley Head London.
- Hornmoen, H., & Steensen, S. (2014). Dialogue as a journalistic ideal. *Journalism Studies*, 15(5), 543–554. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.894358>

- Howe, A., Stoddart, M., & Tindall, D. (2020). Media Coverage and Perceived Policy Influence of Environmental Actors: Good Strategy or Pyrrhic Victory? *Politics and Governance*, 8(2), 298–310. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.2595>
- Janowitz, M. (1975). Sociological Theory and Social Control. *American Journal of Sociology*, 81(1), 82–108. <https://doi.org/10.1086/226035>
- McCurdy, P. (2012). Social Movements, Protest and Mainstream Media. *Sociology Compass*, 6(3), 244–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00448.x>
- McLeod, D., & Hertog, J. K. (1992). The manufacture of public opinion by reporters: informal cues for public perceptions of protest groups. *Discourse & Society*, 3(3), 259–275. <https://doi.org/10.1177/0957926592003003001%0A%0A>
- McLeod, D. M., & Hertog, J. K. (1992). The manufacture of 'public opinion' by reporters: Informal cues for public perceptions of protest groups. *Discourse & Society*, 3(3), 259–275. <https://doi.org/10.1177/0957926592003003001>
- Moscato, D. (2016). Media portrayals of hashtag activism: A framing analysis of Canada's #idlenomore movement. *Media and Communication*, 4(2), 3–12. <https://doi.org/10.17645/mac.v4i2.416>
- Nip, J. Y. M. (2006). Exploring the second phase of public journalism. *Journalism Studies*, 7(2), 212–236. <https://doi.org/10.1080/14616700500533528>
- Olagunju, A., Frankish, T., & Wade, J. P. (2022). Beyond #FeesMustFall: Understanding the inclusion role of social media during students' protests in South Africa. *Cogent Education*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2047316>
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Pintak, L., & Nazir, S. J. (2013). Pakistani journalism: At the crossroads of Muslim identity, national priorities and journalistic culture. *Media, Culture and Society*, 35(5), 640–665. <https://doi.org/10.1177/0163443713483654>
- Rosen, J. (2000). Questions and Answers About Public Journalism. *Journalism Studies*, 1(4), 679–683. <https://doi.org/10.1080/146167000441376>
- Similarweb. (2021). *Top News & Media Publishers Websites Ranking in Indonesia*. <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/news-and-media/>
- Standaert, O., Hanitzsch, T., & Dedonder, J. (2019). In their own words: A normative-empirical approach to journalistic roles around the world. *Journalism*, 22(5). <https://doi.org/10.1177/1464884919853183>
- Weaver, D. H., Beam, R. A., Brownlee, B. J., Voakes, P. S., & Wilhoit, G. C. (2007). *The American Journalist in the 21st Century: U.S. News People at the Dawn of a New Millennium (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410614568>
- Wettstein, M., Esser, F., Schulz, A., Wirz, D. S., & Wirth, W. (2018). News Media as Gatekeepers, Critics, and Initiators of Populist Communication: How Journalists in Ten Countries Deal with the Populist Challenge. *International Journal of Press/Politics*, 23(4), 476–495. <https://doi.org/10.1177/1940161218785979>
- Willnat, L., Weaver, D. H., & Wilhoit, G. C. (2019). The American Journalist in the Digital Age: How journalists and the public think about journalism in the United States. *Journalism Studies*, 20(3), 423–441. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1387071>